

Abstrak

Kartu kredit pemerintah (KKP) merupakan alat pembayaran non tunai yang diciptakan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Tujuan pemerintah menyelenggarakan KKP adalah untuk mengurangi penggunaan uang tunai, meningkatkan keamanan transaksi, dan mengurangi kecurangan transaksi tunai. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Penelitian yang berjudul “Tinjauan atas Penatausahaan dan Pembukuan Kartu Kredit Pemerintah pada KPPN Klaten” memiliki rumusan masalah bagaimana penatausahaan dan pembukuan KKP di KPPN Klaten, apakah KPPN Klaten sudah mengimplementasikan KKP dengan maksimal dan efektif, serta apa saja tantangan yang dihadapi KPPN Klaten dalam mengimplementasikan KKP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penatausahaan dan pembukuan KKP dengan peraturan, mengetahui efektivitas pelaksanaan KKP di KPPN Klaten, dan mengetahui tantangan yang dihadapi KPPN Klaten dalam mengimplementasikan KKP.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data tersebut menggunakan dua metode, yaitu studi kepustakaan/literatur dan studi lapangan. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan membandingkan antara pelaksanaan KKP di KPPN Klaten dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil tinjauan, dapat disimpulkan bahwa secara umum penatausahaan dan pembukuan KKP di KPPN Klaten telah sesuai dengan ketentuan, tetapi masih terdapat beberapa dokumen yang belum sesuai. Selain itu, pelaksanaan KKP di KPPN Klaten masih belum berjalan secara efektif dan maksimal karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti banyak rekanan/penyedia yang belum memiliki mesin EDC, pengenaan pajak, dan banyak rekanan/penyedia yang mengenakan charge.

Kata kunci: kartu kredit pemerintah, penatausahaan dan pembukuan, efektivitas, dan tantangan

Abstract

A government credit card (GCC) is a non-cash payment instrument created by the government through the Ministry of Finance, namely the Directorate General of Treasury. The government's objective in organizing a GCC is to reduce the use of cash, increase transaction security, and reduce fraudulent cash transactions. However, in its implementation, there are still some obstacles. The research entitled "Overview of Administration and Bookkeeping of Government Credit Cards at KPPN Klaten" has a problem formulation of how to administer and book GCC at KPPN Klaten, whether KPPN Klaten has implemented GCC maximally and effectively, and what the challenges faced by KPPN Klaten in implementing GCC. The purpose of this study was to determine the suitability of GCC administration and bookkeeping with regulations, to determine the effectiveness of the implementation of GCC at KPPN Klaten, and to find out the challenges faced by KPPN Klaten in implementing GCC.

The method used in this research is the qualitative method. The data used are primary data and secondary data. Two methods were used in collecting the data: literature studies and field studies. The analytical technique used is to compare the implementation of the GCC at KPPN Klaten with the applicable provisions.

Based on the results of the review, it can be concluded that in general the administration and bookkeeping of the GCC at KPPN Klaten have complied with the provisions. However, there are still some documents that are not appropriate. In addition, the implementation of GCC at KPPN Klaten is still not running effectively and optimally because several obstacles are faced, such as many partners/providers who do not yet have an EDC machine, imposition of taxes, and many partners/providers who charge a fee.

Keywords: *government credit card, administration and bookkeeping, effectiveness, and challenges*